

### Abstrak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Orang tua, pendidik dan lingkungan masyarakat bertanggung jawab untuk mempersiapkan mereka sebaik-baiknya agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sehingga menjadi insan yang berhasil bagi keluarga, bangsa, dan negara. Namun demikian, kenyataannya dalam rangka pertumbuhan dan perkembangannya, banyak anak yang mengalami gangguan dan permasalahan-permasalahan termasuk melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum bila diproses dalam sistem peradilan pidana akan timbul stigma, bahkan banyak anak yang mengalami trauma, kekerasan, dan penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak. Pasal 8 UU SPPA mengatur tentang proses diversifikasi yang dilakukan dengan musyawarah dan para pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi adalah anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Namun demikian, Pasal 8 UU SPPA ini tidak memasukkan unsur pemberi bantuan hukum. Akibatnya, anak-anak yang berkonflik dengan hukum seringkali tidak didampingi oleh pemberi bantuan hukum sehingga banyak perkara anak yang diproses secara hukum dan berakhir dengan pemenjaraan. Sebagai rujukan bagi anak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun mekanisme untuk mengajukan permohonan bantuan hukum diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Bantuan Hukum.

Harapan penulis di masa yang akan datang adalah seyogyanya dalam Pasal 8 UU SPPA dalam kaitannya dengan para pihak dalam proses diversifikasi memasukkan unsur pemberi bantuan hukum dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

**Kata kunci :** Bantuan Hukum, Diversifikasi, Perlindungan Hukum, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

**Abstract**

*Children are a part of the younger generation as human resources, and the potential successor to the ideals of national struggle in the future. Parents, educators and the community are responsible for preparing them as well as possible so that children can grow and develop with reasonable so that a man who worked for the family, nation, and state. However, the reality in the context of growth and development, many children who have the disorder and problems including committing a crime.*

*Children in conflict with the law when processed in the criminal justice system will arise stigma, even many children who experience trauma, violence, and torture by law enforcement officials. Therefore, in order to provide legal protection of the child, the Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System regulates the diversion, namely the transfer of the settlement the child of the criminal justice process to outside the juvenile justice process. Article 8 of the Law SPPA regulate the processes of diversion is done with deliberation and the parties involved in the process of diversion is a child and a parent / guardian, victim and / or the parent / guardian, the supervising social, and professional social workers, social welfare workers, and / or community. However, Article 8 of the Law SPPA does not include the element of legal aid providers. As a result, children in conflict with the law are often not accompanied by legal aid providers so many cases children were brought to justice and ending with imprisonment. As a reference for children to get legal aid is Act No. 16 of 2011 on Legal Aid. As for the mechanism to apply for legal aid under Article 14 and Article 15 of Law on Legal Aid.*

*Hope writer in the future is preferably within Article 8 of the Law SPPA in relation to the parties in the process of diversion include elements of legal aid providers with the aim of providing legal protection for children in conflict with the law.*

**Keywords:** *Legal Aid, Diversion, Legal Protection, children in conflict with law*